



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN/BASARNAS**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 Desember 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 12.20 WIB s.d 14.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas Progres Penyusunan Aturan Pelaksana UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
Ketua Rapat	: Roberth Rouw
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: .... dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 12.20 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen Kementerian PUPR hari ini adalah Membahas Membahas Progres Penyusunan Aturan Pelaksana UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekjen Kementerian PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI menyangkan belum selesainya penyusunan peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan di tingkat Pemerintah.
2. Komisi V DPR RI mendesak Setjen Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral sebagai upaya mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
3. Komisi V DPR RI meminta Setjen Kementerian PUPR untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

## III. PENUTUP

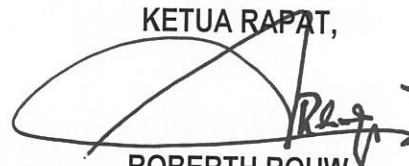
Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 14 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PUPR,

  
MOHAMMAD ZAINAL FATAH

KETUA RAPAT,

  
ROBERTH ROUW